

EVALUASI KEBIJAKAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DALAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG

Yulita Hendrartini
Universitas Gadjah Mada

Latar Belakang: Otonomi daerah telah memberi kesempatan pada daerah untuk mengembangkan sistem jaminan kesehatan di daerahnya termasuk di Kota Semarang. Sistem jaminan kesehatan di Kota Semarang dikenal dengan nama Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Semarang (Jamkesmaskot). Pembiayaan Jamkeskot cenderung meningkat dan selalu defisit setiap tahunnya. Kepesertaan Jamkeskot adalah maskin non Jamkesmas yang sudah ditetapkan dengan SK Walikota, dan masyarakat dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Implementasi kebijakan SKTM sudah berjalan 2 tahun dan belum pernah dievaluasi. Untuk itu diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan SKTM Program Jamkesmaskot Semarang

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kasus dengan Desain Kasus Tunggal Terjalin, subyek adalah stakeholder terkait, yang terdiri dari : pemda, Bappeda, DPRD, Dinkes dan peserta Jamkesmaskot.

Hasil: Ada 2 Persepsi yang saling bertentangan menanggapi kebijakan SKTM, dari persepsi DPRD Kota Semarang menyatakan bahwa SKTM harus tetap ada karena validasi *database* masyarakat miskin belum valid. Sementara dari persepsi eksekutif (Bappeda dan Dinkes) SKTM harus di hentikan karena rawan ketidak tepatan. Hasil kajian juga menunjukkan hanya 1 % dari pengguna SKTM di RS yang memenuhi kriteria miskin. Rerata 65% dari anggaran Jamkesmaskot digunakan oleh masyarakat dengan SKTM, sementara peserta Jamkesmaskot hanya menghabiskan dana 35 %

Kesimpulan: Kebijakan SKTM merupakan kebijakan populis dan cenderung tidak tepat sasaran, data kepesertaan Jamkesmaskot belum memadai serta dana APBD justru banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang relative mampu.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan SKTM, dan Jamkesda